

**TESIS**

**PERGESERAN PARADIGMA CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH**



**MUHAMAD RUSDI**

**NOMOR MAHASISWA 145202262/PS/MIH**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2016**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

---

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Muhamad Rusdi  
Nomor Mahasiswa : 145202262/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : **PERGESERAN PARADIGMA CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tandatangan

Dr. W. Riawan Tjandra., S.H.,M.Hum

26/01/2016

Prof. Dr. Ni'matul Huda., S.H.,M.Hum

22 Jan 2016



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

---

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Muhamad Rusdi  
Nomor Mahasiswa : 145202262/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : **PERGESERAN PARADIGMA CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH**

Telah diuji dan di nyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada Tanggal 28 - 01 - 2016

Dewan Penguji	Nama	Tandatangan
1. Ketua	Dr. W. Riawan Tjandra., S.H.,M.Hum	
2. Sekretaris	Prof. Dr. Ni'matul Huda., S.H.,M.Hum	
3. Anggota	Dr. Elisabeth Sundari., S.H.,M.Hum	



Ketua Program Studi:

Dr. Elisabeth Sundari., S.H.,M.Hum

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Rusdi  
Nomor Mahasiswa : 145202262/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa;

Tesis dengan judul "Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah", merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Tesis ini sejauh pengetahuan penulis belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister Hukum), Baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.

Tesis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian dari penulis sendiri. Semua informasi yang ada dalam tesis ini dikutip dari karya ilmiah lain yang telah diberikan penghargaan. Kutipan yang dikutip oleh penulis dengan menyebutkan secara lengkap identitas pengarang, dan bukunya yang telah sesuai dengan standar penulisan yang baik dan benar. Jika kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan atau sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Januari 2016

  
Muhamad Rusdi

## Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperbolehkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa; *pertama*, terjadi pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi. *Kedua*, adanya semangat dari pihak pemohon dan lembaga yang menguji (Mahkamah Konstitusi) untuk, menata ulang sistem pemilihan kepala daerah demi melindungi hak setiap warga Negara dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan, politik hukum, peraturan perundang – undangan, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: (a) terjadi pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi, (b) terjadi beberapa kendala dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015 yang memberatkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, dan (c) perlu adanya rekonstruksi ulang sistem pemilihan kepala daerah.

Kata kunci: Calon perseorangan, kendala - kendala, hak warga Negara.

### ***Abstract***

*Ruling of the Constitutional Court Number 5/PUU-V/2007 on Judicial of Law Number 32 Year of 2004 on Local Government, which allows independent candidates in local elections show that; **The first**, a paradigm shift of independent candidates in local elections after the reform. **The Second**, the spirit of the applicant and the testing agency (the Constitutional Court) to rearrange the system of local elections in order to protect the right of every citizen in local elections. This research is a normative approach, politics of law, ragulation of law, and conceptual. Results from this study concluded: (a) a paradigm shift of independent candidates in local elections after the reform, (b) there are some constraints in local elections on December 9 Year 2015 incriminating independent candidates in local elections, and (c) the need for reconstruct local elections system.*

**Keywords:** *Independent candidate, constraints, the rights of citizens*



## DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Pemilihan Umum .....	20
B. Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah .....	23
C. Landasan Teori .....	29
1. Teori Demokrasi .....	30
2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) .....	32
D. Batasan Konsep .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metode Penelitian .....	40
1. Jenis Penelitian .....	40
2. Pendekatan Penelitian .....	42
a) Pendekatan Politik Hukum .....	42
b) Pendekatan Perundang-Undangan .....	43
c) Pendekatan Konseptual .....	45
3. Sumber Data .....	46
B. Metode Pengumpulan Data .....	48
C. Analisis Data .....	48
D. Proses Berpikir .....	49

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pergeseran Paradigma Calon Perseorangan Pasca Reformasi .....	51
1. Dinamika Yuridis Pemilihan Kepala Daerah .....	52
a) Korupsi Kepala Daerah .....	65

b) Korupsi Politik Kepala Daerah .....	71
2. Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	78
a) Calon Perseorangan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 .....	83
b) Calon Perseorangan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 .....	89
1) Konsep Uji Publik .....	91
2) Konsep Jumlah Dukungan .....	99
3) Konsep Rekapitulasi Jumlah Suara .....	108
c) Dinamika Calon Perseorangan Ke Calon Tunggal .....	111
B. Jumlah Calon Perseorangan dan Dinamika Dalam Pemilihan Kepala ..	124
1. Jumlah Calon Perseorangan .....	124
2. Dinamika dalam Pemilihan Kepala Daerah .....	128
a. Penjagalan Calon Kepala Daerah .....	129
b. Pemotongan Dana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD.....	134
c. Kebakaran Hutan/Asap .....	138
d. Pembatalan Calon Kepala Daerah .....	142
C. Kendala-Kendala Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 .....	149
1. Jumlah Dukungan .....	154
2. Akumulasi Jumlah Suara .....	157
D. Konsep Ideal Pemilihan Kepala Daerah .....	159
1. Analisis Kemunculan Calon Perseorangan .....	163
2. Analisis Kendala-Kendala Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	169
3. Konsep Ideal Pemilihan Kepala Daerah .....	174
4. Solusi Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	181

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	184
B. Saran .....	185

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah Dukungan dalam UU No. 8 Tahun 2015 .....	26
Tabel 2 : Jumlah Dukungan dalam UU No. 1 Tahun 2015 .....	27
Tabel 3 : Proses Pemilihan Kepala Daerah .....	62
Tabel 4 : Tingkat Kepuasan Publik .....	62
Tabel 5 : Modus Korupsi Politik .....	75
Tabel 6 : Uji Publik .....	98
Tabel 7 : Persyaratan Calon Gubernur .....	106
Tabel 8 : Dukungan Provinsi Berdasarkan Jumlah Penduduk .....	107
Tabel 9 : Dukungan Calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota .....	107
Tabel 10 : Simulasi Dukungan Provinsi Berdasarkan Jumlah Penduduk .....	107
Tabel 11 : Perbandingan Calon Kepala Daerah .....	126
Tabel 12 : Jumlah Calon Kepala Daerah .....	149

## **DAFTAR SKEMA**

Skema 1 : Model Koordinasi KPU .....	179
--------------------------------------	-----